

---

## **ANALISIS WACANA KRITIS OMNIBUS LAW DI MEDIA MASSA *ONLINE* SERTA PEMANFAATANNYA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA**

**Dwi Setyaningsih<sup>1</sup>, Budhi Setiawan<sup>2</sup>, Sri Hastuti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

Email: <sup>1</sup>dwisetyaakns24af@student.uns.ac.id, <sup>2</sup>buset.74@gmail.com,

<sup>3</sup>srihastuti69@staff.uns.ac.id

Submit: 23-04-2022, Revisi: 20-09-2022, Terbit: 29-10-2022

DOI: 10.20961/basastra.v10i2.60972

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keberimbangan dan keberpihakan media, serta peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka belajar. Itu membuat peneliti mengarahkan penelitian ini pada analisis struktur mikro, meso, dan makro teks. Kemudian hasil analisisnya direlevansikan dengan materi ajar artikel di Sekolah Menengah Atas (SMA). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan representasi *omnibus law* di *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com*, proses penyajian berita, serta relevansinya sebagai materi ajar artikel berita di SMA. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif paradigma kritis Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough dikombinasikan dengan analisis framing Pan dan Kosicki. Hasil penelitian ditemukan: 1) representasi *omnibus law* menunjukkan citra negatif; 2) citra tersebut dipengaruhi oleh: a) sikap pekerja media dalam mengonstruksi fakta; b) penggunaan situasi konflik pengesahan sebagai dasar pemberitaan; c) orientasi institusi pada kepentingan ekonomi; d) kondisi sosiokultural, hampir setengah penduduk Indonesia bekerja sebagai buruh/karyawan dengan kondisi sosial ekonomi yang belum merata, ketimpangan sosial ekonomi yang cukup tinggi, dan kekhawatiran publik atas pendegradasian hak-hak dan kesejahteraan buruh/pekerja; 3) representasi dan proses penyajian berita relevan sebagai materi ajar menulis artikel berita di SMA karena sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta sesuai dengan kebutuhan siswa terhadap materi ajar yang baik, memuat pemahaman konteks dan memuat pemodelan teks.

**Kata kunci:** analisis wacana kritis, *omnibus law*, relevansinya sebagai materi ajar artikel.

### ***CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF OMNIBUS LAW AT ONLINE MASS-MEDIA AND ITS USAGE IN INDONESIAN LANGUAGE LEARNING IN SENIOR HIGH SCHOOL***

**Abstrat:** *This research is motivated by the problem of balance and partiality of the media, as well as the transition from the 2013 curriculum to the independent learning curriculum. That makes the researcher direct this research to analyze the micro, meso, and macro structure of*

the text. Then the results of the analysis are relevant to the article teaching material in High School (SMA). This study aims to describe and explain the representation of omnibus law in *Suaramerdekasolo.com* and *Solopos.com*, the process of presenting news, and its relevance as teaching material for news articles in high school. The method used is the qualitative method of the critical paradigm of Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (AWK) combined with Pan and Kosicki framing analysis. The results of the study found: 1) omnibus law representation shows a negative image; 2) the image is influenced by: a) the attitude of media workers in constructing facts; b) the use of conflicting legalization situations as the basis for reporting; c) institutional orientation on economic interests; d) sociocultural conditions, almost half of Indonesia's population works as laborers/employees with uneven socio-economic conditions, high socio-economic inequality, and public concerns over the degradation of the rights and welfare of workers/workers; 3) the representation and process of presenting relevant news as teaching materials for writing news articles in high school because it is in accordance with the Core Competencies and Basic Competencies and is in accordance with the needs of students for good teaching materials, contains contextual understanding and includes text modeling.

**Keywords:** critical discourse analysis, omnibus law, *Suaramerdekasolo.com*, *Solopos.com*, its relevance as article teaching material.

## PENDAHULUAN

Berbagai kepentingan manusia terjalin melalui bahasa. Bahasa tidak hanya dipahami dari aspek kebahasaan atau tekstual melainkan juga dipahami dari aspek kontekstual, di mana bahasa lebih dilihat sebagai praktik sosial (Thadi, 2020: 4). Bahasa hadir sebagai hasil dari praktik sosial manusia dalam berbagai kepentingannya. Oleh karena berbagai kepentingan tersebutlah kemudian muncul permasalahan dalam kebanyakan berita *online* yakni masalah keberimbangan dan keberpihakan.

Dalam suatu pemberitaan, sering kali berita *online* tidak memenuhi satu elemen penting kode etik jurnalistik yaitu keberimbangan. Sehingga tercipta suatu kecenderungan keberpihakan. Seperti halnya pada penelitian Rais dan Herlina (2021: 1) yang menemukan bahwa berita portal *detikcom* tidak cukup seimbang

dengan informasi tentang berita huru-hara antara polisi dan pengunjung rasa.

Hasil penelitian lain dari Azwar, Putra, dan Uljanatunnisa (2021: 48) yang menunjukkan bahwa pemberitaan *Kumparan.com* berpihak kepada salah satu Paslon Capres dan Cawapres Jokowi-Maruf. Selanjutnya penelitian dari Cahyana, Handayani, dan Anggraeni (2022: 78) yang menjumpai keberpihakan media dalam pemberitaan penangkapan Munarman. Penelitian dari Irsyad (2022: v) juga menemukan adanya keberpihakan media. Temuannya menunjukkan *Kompas.com* sebagai media *online* yang dinilai lebih banyak memuat berita yang berpihak kepada pemerintah, sedangkan *Republika.co.id* adalah media *online* yang lebih sering menonjolkan berita yang berpihak kepada sebagian masyarakat Islam.

Dengan keberimbangan, sejatinya wartawan telah berupaya

menguji informasi (verifikasi) untuk mencapai akurasi pemberitaan melalui tidak hanya satu narasumber melainkan beberapa narasumber dari pihak-pihak yang berseberangan. Namun praktiknya masih banyak dijumpai artikel berita yang tidak berimbang dan memiliki kecenderungan keberpihakan. Bertolak dari masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui keberimbangan dan keberpihakan dalam berita melalui analisis representasi.

Penelitian relevan untuk melihat bagaimana sikap media dalam wacana berita yaitu melalui analisis framing dan analisis wacana kritis. Kajian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu penelitian *Analisis Wacana: Representasi Pendidikan Indonesia pada Berita Online Detik.com* oleh Kuswandari, Slamet, dan Setiawan (2017) yang menunjukkan berita pendidikan Indonesia di *detik.com* dikemas dengan penonjolan penempatan *headline* yang mengutip pendapat sumber kutipan. Kesimpulannya yaitu *detik.com* dalam menyikapi masalah pendidikan Indonesia cenderung mengasumsikan perspektif ahli yang bersifat persuasif sehingga menggiring opini pembaca untuk terpengaruh.

Bentuk pengulangan, pemakaian gambar, foto, grafis, dan data pendukung seperti hasil penelitian bidang terkait tema berita memperkuat penonjolan isu yang diangkat. *Detik.com* mengemas berita cukup

kritis menyoroti masalah pendidikan di Indonesia dan cenderung sentimen terhadap tema negatif. Di antara klasifikasi berita pendidikan Indonesia bertema negatif menurut *detik.com*, kasus kekerasan menjadi berita yang paling menonjol.

Penelitian lain melakukan analisis *framing* juga dilakukan oleh Novita, dkk., (2021) dengan judul *Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Media Online Vivanews dan Tirto.id)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kebijakan editorial dan ideologi masing-masing media, di mana *Vivanews* sebagai surat kabar dengan pemilik yang berlatar belakang politik lebih menunjukkan sikap yang sangat hati-hati ketika memberitakan hal-hal yang sensitif, sedangkan pada *Tirto.id* memperlihatkan aspirasi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh/karyawan korporat, sehingga beritanya mengandung unsur penolakan, ketidaksetujuan, dan kontroversi.

Kajian lain yang peneliti jadikan rujukan yaitu penelitian *Analisis Pemberitaan Joko Widodo di Televisi (Analisis Wacana Kritis di Program Reportase Sore TRANS TV)* oleh Ikhwan (2019) yang menganalisis teks berita, produksi berita di *news room*, dan sosial budaya. Hasilnya menunjukkan bahwa pada periode pertama, *Reportase Sore TRANS TV* seakan menjadi humas Jokowi,

sedangkan pada periode kedua *Reportase Sore TRANS TV* mulai bersikap lebih kritis. Tingginya intensitas pemberitaan Jokowi dipengaruhi oleh kepentingan ideologi, sistem kerja redaksi, perspektif produser dan jajarannya. Dari aspek sosial budaya, masifnya pemberitaan Jokowi terkait dengan sistem penyiaran Indonesia yang cenderung mengarah pada mekanisme pasar (kapitalisme).

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu penelitian ini dikaitkan dengan materi ajar pembelajaran bahasa Indonesia (artikel). Perbedaan lainnya yaitu pada metode yang dipakai. Penelitian lain hanya menggunakan satu metode tanpa kombinasi. Misalnya penelitian khusus pada analisis framing atau analisis wacana kritis Norman Fairclough. Namun, penelitian ini menggunakan kombinasi dua metode analisis, yaitu analisis framing Pan Kosicki (untuk analisis tekstual) dan analisis Norman Fairclough (untuk analisis praktik wacana serta praktik sosiokultural).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian lain dan memiliki urgensi penelitian berupa pengetahuan baru, untuk meningkatkan kinerja insan pers, dan memberikan masukan melalui kritik naskah (berita yang dianalisis). Selain itu juga masukan kepada guru untuk memberikan pendidikan bahasa yang bersumber

dari berbagai profesi dan mengarahkan pada pembelajaran evaluatif, misalnya bahasa profesi wartawan dalam teks artikel (berita) dianalisis untuk tujuan evaluasi. Sehingga pendidikan bahasa diarahkan pada menulis artikel secara kritis melalui pembelajaran berbasis proyek, bersifat literasi, esensial dan mendalam, dengan penguatan nilai-nilai Pancasila, kontekstual dan bermuatan lokal sebagai upaya menuju merdeka belajar.

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk mengungkap bagaimana media mengonstruksi pemberitaan *omnibus law* dan mengungkap kepentingan tersirat yang melatarbelakangi media memberitakan *omnibus law*. Penelitian analisis wacana kritis ini tidak berhenti pada bagaimana suatu teks berita dihadirkan, tetapi bagaimana dan mengapa bahasa/pesan tersebut dihadirkan.

Wacana yang dianalisis adalah berita bertopik *omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com*. Alasan dipilihnya topik tersebut karena di zaman serba internet ini, masyarakat dapat dengan mudah dan murah mengakses berita dari media daring. Berita di media daring merupakan suatu wacana yang cepat, efektif, dan efisien dalam membentuk pemikiran masyarakat pembacanya. Topik *omnibus law* merupakan topik yang penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Di dalamnya,

pemerintah mengatur berbagai kepentingan pengusaha dan pekerja. Ada situasi pro-kontra di masyarakat terhadap pengesahan undang-undang (UU) tersebut. Pemerintah telah mengesahkan regulasi tersebut meski itu kontroversial. Demonstrasi oleh masyarakat yang kontra telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia, puncaknya yaitu beberapa hari setelah pengesahan *omnibus law* UUCK yakni pada tanggal 4-10 Oktober 2020 lalu.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan (1) representasi *omnibus law*, (2) proses penyajian berita *omnibus law* di *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com*, serta (3) relevansi representasi dan proses penyajian berita sebagai materi ajar menulis artikel berita di SMA. Tujuan tersebut berguna untuk mengetahui perspektif media dalam merepresentasikan kebijakan yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 tersebut dan mengetahui adakah pihak yang dimarginalkan, serta alasan yang melatarbelakanginya yang pada akhirnya digunakan sebagai materi ajar menulis artikel secara kritis di SMA.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif paradigma kritis menggunakan AWK Norman Fairclough yang dikombinasikan dengan analisis framing Pan dan Kosicki. Sumber data penelitian

meliputi (1) dokumen (berita *omnibus law* edisi 4-10 Oktober 2020 dari *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com*, serta dokumen perusahaan media seperti profil dan sejarah perusahaan, struktur organisasi, buku-buku, dan jurnal relevan), (2) hasil wawancara pihak pembuat naskah, guru bahasa Indonesia, dan siswa.

Teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling* untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Melalui pencarian berita dengan kata kunci *omnibus law* di kolom pencarian beranda *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com*, total berita *omnibus law* edisi Oktober 2020 dari kedua media ada 51 berita. *Suaramerdekasolo.com* memuat 11 berita, sedangkan *Solopos.com* memuat 40 berita. Dalam penelitian ini, analisis berita dibatasi tanggal 4-10 Oktober 2020 karena berdasar *Google Trends* terlihat dalam kurun waktu satu tahun (22 Maret 2020 s/d 21 Februari 2021) pemberitaan *omnibus law* di media daring Indonesia naik drastis pada 4-10 Oktober 2020. Dari pembatasan analisis, ditemukan 4 berita dari *Suaramerdekasolo.com* dan 31 berita dari *Solopos.com*. Selanjutnya dibatasi pada berita lokal wilayah Solo Raya. Ditemukan 2 berita dari *Suaramerdekasolo.com* dan 15 berita dari *Solopos.com*. Kemudian, dipilih data secara acak dengan diambil satu berita sebagai data per harinya guna

dijadikan data penelitian. Rincian data disajikan pada Tabel 1.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis dokumen dan wawancara. Teknik uji validitas

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Adapun untuk menganalisis data dilakukan analisis tekstual, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosiokultural.

Tabel 1. Dokumen Sumber Data Penelitian

Media	Data	Judul
Suara merdeka solo.co m	1	Ribuan Massa Berkumpul di Simpang Tiga Kartasura, Gelombang Demo Tolak Omnibus Law
	2	Putra Ketua Partai Demokrat Solo Jadi Korban Pemukulan Oknum Aparat Saat Unjuk Rasa di Kartasura
Solopos.com	3	Tidak Dilihat Pengambil Kebijakan, KSPI Jateng Emoh Demo Tolak Omnibus Law Di Daerah
	4	Protes Pengesahan Omnibus Law, Aktivis Mahasiswa Solo Dukung Mogok Kerja Nasional
	5	Omnibus Law UU Cipta Kerja Jadi Polemik, Ketua Ormas Tikus Pithi Hananta Baris: DPR Harus Beri Penjelasan
	6	Aksi Demo Tolak Omnibus Law di Gladak Solo Tak Diizinkan Polisi, Batal?
	7	Deretan Artis Yang Tolak Omnibus Law, Nomor 1 Singgung Pengkhianat
	8	Omnibus Law UU Cipta Kerja Kadung Disahkan, Ini Saran Walikota Solo Untuk Pihak Yang Menolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang disajikan mengikuti tahapan analisis wacana kritis Norman Fairclough dengan tiga dimensi analisis. Dimensi pertama analisis tekstual difokuskan pada representasi menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki. Kemudian dilanjutkan ke dimensi analisis praktik wacana dan praktik sosiokultural.

### Representasi *Omnibus Law*

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif secara kritis, dapat dinyatakan bahwa dalam suatu wacana berita terdapat praktik konstruksi realitas melalui representasi suatu

objek. Dengan demikian, makna yang muncul dalam berita merupakan citra hasil konstruksi persepsi tentang isu atau aspek dari isu yang dianggap penting untuk memperjuangkan suatu kepentingan.

Data (1) menyoroti situasi yang terjadi di Simpang Tiga Kartasura menggunakan strategi kuantifikasi.

Ribuan Massa Berkumpul di Simpang Tiga Kartasura, Gelombang Demo Tolak Omnibus Law (B1\_Judul)

Bagian judul data (1) merepresentasikan *omnibus law* sebagai UU yang ditolak oleh ribuan massa. Hasil temuan menunjukkan citra negatif *omnibus law* UUCK.



Citra *omnibus law* juga negatif melalui berbagai permasalahan dan penolakan seperti pada *headline* berikut ini.

Putra Ketua Partai Demokrat Solo jadi Korban Pemukulan Oknum Aparat saat Unjuk Rasa di Kartasura. (B1\_Judul)

*Omnibus law* pada data (2) direpresentasikan sebagai undang-undang yang ditolak melalui unjuk rasa yang menimbulkan jatuhnya korban luka.

UUCK yang disahkan DPR juga direpresentasikan sebagai UU yang mengurangi hak-hak pekerja dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak dan tidak pro terhadap kesejahteraan buruh, seperti pada data (1) dan (5) berikut:

Mereka menilai UU cipta kerja merugikan buruh dan lebih menguntungkan pemilik modal. (B1\_K5)

Representasi negatif *omnibus law* juga tampak pada pemakaian gaya bahasa derogasi seperti di bawah ini.

“...atau mengubah undang-undang yang hanya untuk kepentingan pengusaha.” (B5\_K11)

Sesuai dengan pendapat Thadi (2020: 4) dan Hasanah (2014: 3), mereka melihat bahasa sebagai praktik sosial manusia dalam berbagai kepentingannya; yang mana di dalamnya memuat makna realitas sebagai suatu citra untuk persepsi tentang mana isu atau aspek dari isu yang penting dan mana yang tidak. Kedelapan berita cenderung mengarah

pada kepentingan kritik terhadap *omnibus law* melalui representasi *omnibus law* yang masih banyak kekurangan seperti pada data (7).

...Ernest Prakasa juga menilai UU Cipta Kerja tak sepenuhnya buruk, tapi bagi dia tak cukup. (B7\_K17)

Penggunaan gambar pun bernuansa protes, kekerasan, demonstrasi, dan penolakan karena pihak penolak *omnibus law* ditempatkan sebagai subjek pelaku utama ataupun subjek sasaran dalam berita (data 7).

Temuan hasil penelitian ini mendukung pendapat Syahrawi dan Sugandi (2020: 7153) yang berasumsi bahwa suatu berita mempunyai *frame* yang di dalamnya terlihat bagaimana seseorang memaknai suatu tanda yang dimunculkan dalam teks dari sudut pandang wartawan.

Representasi *omnibus law* di *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com* menempatkan masyarakat penolak *omnibus law* diposisikan sebagai pihak korban yang dibela dan dominan, pihak pemerintah selaku pembuat dan pengatur kebijakan menduduki posisi yang termarginalkan, sedangkan pihak pengusaha yang dianggap memperoleh keuntungan juga terpinggirkan dari pemberitaan. Sebagaimana seperti terlihat pada penggunaan eufemisme pada data (5) berikut ini.

“...Ketua Tikus Pithi itu menilainya sebagai bentuk perjuangan rakyat utamanya kaum buruh.”

Temuan ini mendukung pendapat dari Lombardia (2018: 40) yang menyatakan bahwa jurnalis tidak hanya melaporkan peristiwa secara tidak memihak, tetapi dengan hati-hati memilih beberapa aspeknya. Kata-kata yang dipilih oleh jurnalis berkontribusi untuk menciptakan makna tertentu, atau representasi dari peristiwa tersebut, dan jika melalui representasi ini ideologi tersembunyi dikedepankan.

### **Interpretasi Proses Penyajian Berita**

Referensi *omnibus law* telah berubah, tidak sekadar konsep di kamus, melainkan telah bergeser kepada konsep hasil interaksi/praktik sosial. Interaksi yang terjadi menempati konteks situasi, institusi, dan sosial tertentu. Sesuai dengan pendapat Fairclough dalam (Eriyanto, 2012: 346–349) bahwa “Secara tidak sadar wartawan memproduksi dan mereproduksi praktik pemaknaan yang dihasilkan oleh kelompok dominan...”.

Pergeseran maupun perubahan makna *omnibus law* makna leksikal yang netral menjadi negatif dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi dalam praktik wacana dan praktik sosial budaya. Hal itu sesuai dan mendukung apa yang dikatakan Iskandar dan Lestari (2016: 16), bahwa makna timbul karena adanya interaksi antara satu orang atau lebih dalam konteks tertentu melalui berbagai medium. Hasil penelitian relevan dengan penelitian Dianastiti dan Mardikantoro (2016) yang mana

citra positif maupun negatif yang terbentuk ditentukan oleh praktik wacana media massa yang bersangkutan.

Data interaksi dan konteks dipaparkan pada Tabel 2 dan penjelasan yang melatarbelakangi citra negatif *omnibus law* dipaparkan dalam pembahasan berikut ini.

**Pertama**, interaksi pekerja media dalam kedelapan berita memfokuskan pada permasalahan *omnibus law* UUCK dari sudut pandang pihak kontra. Para pekerja media yang juga merupakan pekerja, sedikit banyak memiliki cara pandang dan keyakinan untuk memperjuangkan kepentingan kesejahteraan para buruh/pekerja. Sehingga mereka memberikan ruang untuk pihak buruh dan pekerja untuk menyatakan pandangannya yang menilai bahwa *omnibus law* itu merugikan pihak buruh dan pekerja. Sebagaimana seperti pada kutipan wawancara dengan wartawan *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com* sebagai berikut ini.

Rata-rata masyarakat kita buruh... Kalau ini kan sudah menjadi konsumsi isu nasional itu...mau tidak mau kita harus mengikuti. (HS)

Jadi kenapa saya memberitakannya begitu, karena ya saya berada di posisi e yang harus dibela itu *voicelless-voicelless* yang nggak punya suara ya, masyarakat banyak.

Karena dari berbagai poin yang ada di dalam *omnibus law* itu memang banyak yang merugikan masyarakat



gitu, dan juga pekerja, dan juga karyawan. Sementara saya adalah karyawan, dan saya juga buruh, tentu saja saya akan berpihak pada mereka. (MR)

Ada interaksi sosial antara wartawan dengan pekerja lain dalam institusi seperti redaktur, editor, dan lain-lain. Ada juga interaksi pekerja media dengan masyarakat dan narasumber yang semuanya memengaruhi sajian berita.

Ada tindakan wartawan berupa sikap perhatiannya terhadap suatu peristiwa, tindakan pemilihan *angle*, tindakan pemilihan narasumber, tindakan mencapai suatu kepentingan, dan lain-lain. Seperti pada data berikut ini.

...kita melansir, melansir dari berita nasional. Kemudian kita *breakdown*, kita istilahnya kita kaitkan dengan isu daerah. (S)

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Sujiman (dalam Badara, 2012, 10) terkait dengan adanya tindakan pekerja media dalam melakukan pemilihan simbol, pemilihan fakta, dan kesediaan memberi tempat ketika mengonstruksi realitas yang berujung pada pembentukan citra.

Representasi *omnibus law* dapat dilihat melalui hasil data sentimen (reaksi/sikap yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan nilai seseorang atau sesuatu) dan penempatan narasumber pada tabel berikut.

Tabel 2. Sentimen terhadap *Omnibus Law* dan Penempatan Narasumber

	tanggal	item	Sentimen terhadap <i>omnibus law</i>			Perspektif terhadap <i>omnibus law</i>		
			(-)	netral	(+)	pro-masyarakat	netral	pro-pemerintah
Suamerdekasolo.com	8 Okt	Ribuan Massa Berkumpul di Simpang Tiga Kartasura, Gelombang Demo Tolak Omnibus Law	√			√		
	9 Okt	Putra Ketua Partai Demokrat Solo Jadi Korban Pemukulan Oknum Aparat Saat Unjuk Rasa di Kartasura	√			√		
	5 Okt	Tidak Dilihat Pengambil Kebijakan, KSPI Jateng Emoh Demo Tolak Omnibus Law Di Daerah	√			√		
Solopos.com	6 Okt	Protes Pengesahan Omnibus Law, Aktivis Mahasiswa Solo Dukung Mogok Kerja Nasional	√			√		
	7 Okt	Omnibus Law UU Cipta Kerja Jadi Polemik, Ketua Ormas Tikus Pithi Hanata Baris: DPR Harus Beri Penjelasan	√			√		
	8 Okt	Aksi Demo Tolak Omnibus Law Di Gladag Solo Tak Diizinkan Polisi, Batal?	√			√		
	9 Okt	Deretan Artis Yang Tolak Omnibus Law, Nomor 1 Singgung Pengkhianat	√			√		

10 Okt	Omnibus Law UU Cipta Kerja Kadung Disahkan, Ini Saran Wali Kota Solo Untuk Pihak Yang Menolak	√				√
total		8	0	0	7	0
total berita			8			8

Pada tabel 2 menunjukkan *omnibus law* bernilai negatif (kurang baik). Hal itu muncul dan terbentuk melalui perspektif narasumber dari masyarakat kontra. Kedelapan pemberitaan menunjukkan kedua media menyikapi *omnibus law* cenderung banyak mengasumsikan perspektif dari sudut pandang masyarakat kontra. Sehingga dapat digolongkan ke dalam berita-berita dengan perspektif pro-masyarakat. Temuan data mendukung pendapat Wati, (2014: 71) dan Sudiby (2013: xiv) bahwa wartawan yang memberitakan suatu peristiwa dengan menggunakan perspektif pro-masyarakat mempunyai sikap mendukung, memihak, simpati, senang terhadap apa yang sedang dilakukan masyarakat dalam peristiwa tersebut; pers juga niscaya bekerja berdasarkan kecenderungan atau keberpihakannya.

Secara tidak langsung, media menunjukkan kepada masyarakat bahwa ketidakadilan sedang menimpa para pekerja dan buruh melalui *omnibus law* UUCK. Opini pembaca digiring untuk memberikan pencitraan positif pada *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com* sebagai media yang aktif dan eksis dalam menyuarakan usaha mencapai keadilan bagi ketimpangan yang terjadi di dalam

sistem sosial masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Fairclough (dalam Pandanwangi, 2019: 30) yang menyatakan bahwa “...Sebuah peristiwa diskursus tidak mungkin terlepas dari proses sosial dan struktur sosial yang ada.”

**Kedua**, dengan alasan kebernilaian berita, kedua media menggunakan situasi konflik menjadi dasar dalam pemberitaan kedelapan berita di kedua media. Sebagaimana SH mengatakan sebagai berikut.

Tentang pembatasan-pembatasan dan lain sebagainya itu kan.. sehingga menimbulkan polemik. Itu salah satu berita yang bagus.. Itu memang berita masyarakat lah, dibutuhkan masyarakat untuk biar masyarakat tau apa yang terjadi atas Undang-Undang *omnibus law*... (SH)

Representasi *omnibus law* bernilai negatif karena media menggunakan situasi konflik/kontroversi pengesahan *omnibus law*. Konstruksi pemberitaan memperlihatkan bahwa teks dipengaruhi oleh situasi konflik sosial antara rakyat dan penguasa (lebih spesifik konflik masyarakat yang menolak regulasi dengan pembuat regulasi). Sesuai dengan penelitian Hepridayanti dan Fauzi (2021: 87), bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR belum diterima publik.

Dari beberapa klaster RUU Cipta Kerja yang lebih dipermasalahkan adalah aturan tentang ketenagakerjaan. Publik merasa *omnibus law* UUCK tidak adil lantaran di satu sisi menguntungkan pengusaha dan di sisi lain mengurangi hak pekerja dan buruh. Situasi menunjukkan tidak adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terdampak.

Publik menolak *omnibus law* UUCK dengan melakukan unjuk rasa di 20 daerah/provinsi. Penelitian dari Kartikasari dan Fauzi (2021: 39) menunjukkan bahwa Banyak elemen masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahaan UUCK tersebut. UUCK dinilai tidak memihak kepada masyarakat terutama kaum buruh. Beberapa pasal dalam UUCK dinilai merugikan kaum buruh. Salah satunya mengenai uang pesangon dan nilai santunan yang diturunkan.

*Ketiga*, alasan kenapa citra *omnibus law* negatif yaitu karena faktor media itu sendiri (institusional). Orientasi pemberitaan di *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com* lebih mengarah pada kecepatan pemberitaan. Sebagaimana SH mengatakan seperti di bawah ini.

...ya sebenarnya berita itu harus *cover both side* biasanya. Namun karena kendala tuntutan kecepatan...

Kecepatan menjadi nilai tambah, tetapi di sisi lain berimplikasi pada berita yang tak jarang hanya mengover dari salah satu pihak.

Semakin banyak berita semakin banyak keuntungan dari setiap klik yang ditekan *netizen*. Maka orientasi berita *online* di kedua media terutama mengarah pada kepentingan ekonomi media untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan berbagai strategi kupasan beritanya. Seperti yang dikatakan HS berikut ini.

Kalau kasusnya yang ini itu kalau kaitannya dengan *balance*-nya, ya ini memang boleh dikatakan tidak *balance*. Nah dalam strategi berita *media online* itu...sekali lagi itu adalah strategi pemasaran...

Temuan hasil penelitian mendukung pendapat Crystal (dalam Subyantoro, 2018: 9) tentang adanya faktor luar bahasa, seperti faktor sosial budaya, ekonomi, bahkan politik dalam wacana.

Kebanyakan media berorientasi pada apa dan bukan kenapa. *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com* juga tak lepas dari kecenderungan untuk memberitakan hal yang sepotong-potong dari salah satu pihak dan kurang mengover atau memberikan ruang jawaban dari pihak lain dalam sebuah berita untuk mengonfirmasi langsung atas apa yang pendapat pihak pertama sampaikan. Konfirmasi ataupun tanggapan biasa ditemukan di berita lainnya. Ini akan mempersempit *frame*/bingkai berita dengan kata lain akan mempersempit pemikiran pembaca. Oleh karena itu, pembaca dituntut harus lebih bayak mencari sumber-sumber lain dan

memberi ruang berpikir dari kedua sisi yang berlawanan.

Dalam hal kupasan suatu berita itu menjadi hak media sepenuhnya. Namun demikian, media harus selalu memperhatikan bahwa media hendaknya memberikan penjelasan kepada pembaca terhadap berita-berita yang masih memerlukan verifikasi. Apabila suatu berita masih memerlukan verifikasi lebih lanjut akan diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam tanda kurung dan menggunakan huruf miring (Iskandar dan Lestari, 2016: 324).

*Keempat*, alasan citra *omnibus law* negatif yaitu karena adanya pengaruh kondisi sosiokultural. Terdapat kekhawatiran publik terhadap permasalahan kebijakan *omnibus law* UUCK. Dengan kondisi sosial ekonomi yang belum merata dan ketimpangan sosial ekonomi yang cukup tinggi (Purba, 2020: 84-85), masyarakat khawatir kesejahteraan mereka makin menurun dengan disahkannya *omnibus law* UUCK.

### **Pemanfaatan Data Representasi dan Proses Penyajian Berita *Omnibus Law* dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA**

Representasi dan proses penyajian berita relevan sebagai materi ajar menulis artikel berita di kelas XII SMA karena menggunakan pendekatan kritis dengan memanfaatkan teks yang bersifat

kontekstual dan konstruktif untuk mengarahkan siswa pada literasi media dan informasi di lingkungan sosialnya. Sebagaimana sesuai yang dikatakan Umar (2011: 37) bahwa materi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia semestinya memanfaatkan teks yang secara potensial memiliki area kehidupan sosial budaya maupun ideologi.

Selain itu materi sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Ataç (2015: 621) menyampaikan bahwa saat ini, isu berpikir kritis sangat menantang dan menjadi tren bagi para guru bahasa karena orang telah dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi untuk berpikir kritis baik pada masalah nasional maupun internasional.

Materi representasi dan proses penyajian berita juga sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KIKD) artikel. Selain itu, materi memenuhi kebutuhan siswa terhadap materi ajar yang baik tentang menulis artikel di kelas XII SMA. Materi telah memenuhi kriteria: 1) sah, 2) penting, 3) bermakna bagi kehidupan, 4) layak diajarkan/dipelajari, 5) menarik minat. Sehingga sesuai dengan teori kriteria materi ajar yang baik dari Poerwati dan Amri (dalam Prastika, dkk., 2018: 181).

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa representasi dan proses penyajian berita relevan untuk dijadikan materi ajar menulis artikel berita di SMA karena sesuai KIKD

dan lima kriteria materi ajar yang baik. Oleh karenanya perlu dikembangkan dan dibuat seperangkat materi ajar secara lengkap yang disusun sistematis seperti modul yang memuat materi hingga penilaian dan evaluasi pembelajarannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis wacana kritis *omnibus law* di *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com* melalui delapan artikel berita periode 4-10 Oktober 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Representasi *omnibus law* di delapan artikel berita menunjukkan citra negatif *omnibus law*. Citra *omnibus law* buruk sebagaimana undang-undang yang ditolak, dikritik, dan tidak didukung oleh masyarakat dari kalangan buruh, pekerja, mahasiswa, dan artis. *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com* membingkai *omnibus law* dengan menonjolkan aspek peristiwa penolakan pengesahan *omnibus law* UUCK. Keduanya menekankan pada substansi bahwa meski sudah disahkan, UUCK masih ditolak oleh masyarakat kalangan buruh, aktivis, mahasiswa, dan para artis. Penyajian kedelapan berita cenderung pada pemunculan konflik dan mengarah pada ranah kritik. Masyarakat penolak *omnibus law* diposisikan sebagai pihak korban yang dibela dan dominan, pihak pemerintah selaku pembuat dan pengatur

kebijakan menduduki posisi yang termarginalkan, sedangkan pihak pengusaha yang dianggap memperoleh keuntungan juga terpinggirkan dari pemberitaan.

Kedua, jika dikaitkan dengan proses penyajian berita, citra *omnibus law* negatif disebabkan oleh (1) sikap pekerja media dalam mengonstruksi fakta (menaruh perhatian, menempatkan *angle*, dan narasumber) lebih banyak memfokuskan permasalahan *omnibus law* UUCK dari sudut pandang pihak kontra; (2) penggunaan situasi konflik/kontroversi pengesahan *omnibus law* sebagai dasar pemberitaan; (3) institusi media yang berorientasi pada kepentingan ekonomi media untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya melalui kecepatan pemberitaan; (4) pengaruh kondisi sosiokultural, yaitu hampir setengah penduduk di Indonesia bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Kondisi sosial ekonomi masyarakat belum merata, ketimpangan sosial ekonomi yang cukup tinggi, dan kekhawatiran publik atas pendegradasian hak-hak dan kesejahteraan buruh dan pekerja.

Ketiga, representasi dan proses penyajian berita *omnibus law* di *Suaramerdekasolo.com* dan *Solopos.com* relevan sebagai materi ajar menulis artikel berita di SMA karena sesuai dengan KIKD artikel kelas XII (Permendikbud No. 37 tahun 2018) dan sesuai dengan kebutuhan siswa kelas XII. Oleh karena itu, selanjutnya dapat dibuat perangkat

pembelajaran bab artikel yang diarahkan pada artikel berita dengan

diawali pemahaman konteks, kemudian pemberian model teks, dan kegiatan bersama memproduksi teks.

## REFERENSI

- Ataç, B, A. (2015). From descriptive to critical writing: A study on the effectiveness of advanced reading and writing instruction. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 199: 620–626.
- Azwar, A., Putra, R. P., dan Uljanatunnisa, U. (2021). Unsur Keberpikahan Pada Pemberitaan Media Online Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kampanye pada Kumparan.com. *Jurnal Studi Journalistik*. 3(1), 48-62.
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. 2012. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burhanudin, H., Sumarlam., dan Rakhmawati, A. (2020). *Prosiding Seminar Daring Internasional Riksa Bahasa XIV Dimensionalitas Imbauan Work From Home Dalam Akun Instagram Wali Kota Surakarta 2016-2021 F. X. Hadi Rudyatmo: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough*, hlm. 145–153. Bandung: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia.
- Cahyana, L., Handayani, G., dan Anggraeni, D. (2022). Berdebat Soal Pennagkapan Munarman Ke Mana Media Massa Berpihak? *Jurnal Polinter*. 8(1): 78–108.
- Dianastiti, F. E., dan Mardikantoro, H.B. (2016). Analisis Wacana Kritis Pemberitaan *Harian Suara Merdeka, Harian Republika, Harian Kompas, dan Tabloid Derap Langkah Guru* dalam Pembentukan Citra Guru. *Seloka*. 5(2): 136–147.
- Hepridayanti dan Fauzi, A. M. (2021). Perlawanan Masyarakat pada Pengesahan UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Sosiologi Hukum. *Reformasi Hukum*, 25(1), 77-91.
- Idris, M. (2020). Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law. Diperoleh 2 Januari 2021, dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/meng-apa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all>.
- Ikhwan, M. (2019). Analisis Pemberitaan Joko Widodo di Televisi (Analisis Wacana Kritis di Program Reortase Sore TRANS TV). *PERSPEKTIF Komunikasi*. 3(1): 8–22.
- Irsyad, M. (2022). Framing Politik Identitas pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017 (Studi Atas Pemberitaan Media Online *Kompas.com* Dan



- Republika.co.id*). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Iskandar, D. S., dan Lestari, R. (2016). *Mitos Jurnalisme*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Juliza, M. (2018). *Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Cerpen Jangan Panggil Aku Katua Karya Yulhasni*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Kartikasari, H., dan Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 39-52.
- Kuswandari, A.H., Slamet. St. Y., dan Setiawan. B. (2017). Analisis Wacana: Representasi Pendidikan Indonesia pada Berita Online *Detik.com*. *Metalingua*. 15(2): 145–152.
- Lombardi, D. (2018). Critical Discourse Analysis of Online News Headlines: A Case of the Stoneman Douglas High School Shooting. *Thesis*. Malmö University.
- Mulachela, H. (14, Januari 2022). Artikel Adalah Salah Satu Karya Tulis, Ini Penjelasannya. Diperoleh 19 Maret 2022, dari <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61e150a7c707b/artikel-adalah-salah-satu-karya-tulis-ini-penjelasannya>.
- Novita, I., Nur, I., Rose, T., dan Reyhan, M. (2021). Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Media Online VivaneWS dan Tirto.id). *Jurnal Syntax Administration*. 2(1): 69–84.
- Nugroho, C. (2014). Konstruksi Berita Kontroversi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (Analisis Framing Pan dan Kosichi terhadap Berita Surat Kabar Harian Kompas dan Kedaulatan Rakyat Edisi Januari 2011-Maret 2011). *Jurnal Komunikasi*. 2(3): 27–43.
- Pahlevi, A.F. (2019). Hegemoni Harian Fajar Menjelang Pilpres 2019 (Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough). Skripsi. UIN Alauddin Makassar. Diperoleh 13 Januari 2021, dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/6956>.
- Pan, Z dan Kosicki, G. M. (1993). Framing Analysis: An Approach to News Discourse. *Political Communication*. 1(1): 55–75.
- Pandanwangi, P.S. (2019). Kajian Wacana Kritis terhadap PERPPU No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Diperoleh 1 Januari 2021, dari <http://eprints.undip.ac.id/81058>
- Prastika, D. V., Suyitno., dan Suryanto, E. (2018). Nilai Pendidikan Novel Lipstick Karya Achmad Munif dan Relevansinya sebagai Materi Ajar Apresiasi Sastra di SMA. *Paedagogia*. 21(2): 169–185.
- Purba, R, S. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia. Skripsi Universitas Sumatra Utara.
- Putra, A. (2019). Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi

- Regulasi. *Legislasi Indonesia*. 17(1): 1–10.
- Rahmadi, F. (2016). *Pengembangan Materi Ajar dalam Konsep Pendidikan Islam*. Medan: UNPAB.
- Rais, M. A., dan Herlina, M. (2021). Keberimbangan Berita Demonstrasi Tolak Ru Kpk-Rkuhp 2019 Oleh Portal Berita Detikcom. *Pantarei*. 5(02): 1-10.
- Sepriyanto, A., dan Riyanto, B. (2017). Perbandingan Pemberitaan Seputar Kebijakan Tax Amnesty di Media *Online Kompas.com* dengan *Viva.co.id* (Studi Perbandingan dengan Menggunakan Analisis Framing Model Pan dan Kosicki pada Media *online*). *Transformasi*. 1(32):1–75.
- Subyantoro. (2018). Mengetahui Linguistik Forensik. Dalam Ristiyani., dan Widiyanto, E (Eds). *Prosiding SEMAI I*. Universitas Muria Kudus.
- Sudiby, A. (2013). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang.
- Umar, F. A. R. (2011). Sumbangan Analisis Wacana Terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*. 1(1): 37–47.
- Wati, B. W. (2014). *Analisis Wacana Kritis Berita Sosial Politik Surat Kabar Kedaulatan Rakyat*. (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta).
- Zulkifli dan Royes, N. (2017). Profesionalisme Guru dalam Mengembangkan Materi Ajar Bahasa Arab di MIN 1 Palembang. *JIP*. 3(2): 120–133.